

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

(The Influence of Internal Control Systems on the Quality of Financial Reports of the Regional Secretariat of Balangan Regency)

Abdul Kadir¹, Riezky Amalia², Ali Audah³, Rofinus Leki⁴

1,2,3,4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Populasi penelitian terdiri dari 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dengan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Analisis data dilakukan dengan Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, dan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara simultan, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (2) secara parsial, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan, sementara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (3) Lingkungan Pengendalian merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kata kunci: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract: This study aims to analyze the simultaneous and partial influence of the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Internal Control Monitoring on the Quality of Financial Reports of the Balangan Regency Regional Secretariat. This study uses a quantitative approach with a causal associative research type, which aims to explain the causal relationship between independent and dependent variables. The study population consisted of 45 Civil Servants (PNS) of the Balangan Regency Regional Secretariat, with a saturated sampling technique, so that the entire population was sampled. Data analysis was carried out using Instrument Tests, Classical Assumption Tests, and Multiple Linear Regression. The results of the study indicate that: (1) simultaneously, the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Internal Control Monitoring have a significant effect on the Quality of Financial Reports; (2) partially, the Control Environment, Risk Assessment, and Information and Communication have a significant effect, while Control Activities and Internal Control Monitoring do not have a significant effect on the Quality of Financial Reports; (3) The Control Environment is a variable that has a dominant influence on the Quality of Financial Reports.

Keywords: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Internal Control Monitoring, Financial Reporting Quality

Alamat korespondensi:

Abdul Kadir, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin. e-mail: audahkadir63@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh organisasi untuk melindungi aset dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan akurasi serta kepercayaan terhadap laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel guna mencapai pengendalian internal yang memadai.

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah tidak hanya menerima dana perimbangan, tetapi juga harus menerapkan prinsip keuangan yang adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Seiring

perkembangan sistem pemerintahan pasca-reformasi, Indonesia beralih dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi tantangan dalam pemerintahan, sehingga penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus diterapkan secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan publik.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengatur sistem pengendalian internal, di mana lingkungan pengendalian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pegawai terhadap transparansi dan profesionalisme dalam laporan keuangan. Integritas pegawai serta kepemimpinan yang efektif dalam mengendalikan lingkungan kerja menjadi elemen utama dalam menciptakan sistem yang akuntabel.

Selain itu, penilaian risiko juga merupakan bagian penting dalam pengendalian internal. Semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus memahami risiko yang mungkin terjadi dan mengupayakan langkah mitigasi. Inspektorat dan Kejaksaan Negeri memiliki peran dalam memberikan pendampingan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan sering terjadi akibat kurangnya pemahaman aturan serta minimnya pendampingan teknis, yang mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan.

Kegiatan pengendalian dilakukan sebagai respons terhadap hasil penilaian risiko. Prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan bertujuan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan harus terlibat aktif dalam semua tahap pengelolaan keuangan, dari perencanaan hingga pengawasan, serta tidak sepenuhnya mengandalkan laporan bawahannya tanpa verifikasi mendalam.

Komunikasi dan informasi juga memiliki peran krusial dalam pengendalian internal. PP No. 60 Tahun 2008 menekankan bahwa informasi berkualitas dan komunikasi efektif mendukung

pengambilan keputusan yang tepat. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pemantauan pengendalian internal juga menjadi elemen penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan. Audit dan evaluasi rutin dapat membantu menilai apakah pengendalian internal berjalan dengan baik dan memastikan pencapaian visi serta misi organisasi.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan yang baik harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas sistem pemerintahan dan mencerminkan kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2022, ditemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Permasalahan tersebut mencakup pengelolaan kas yang kurang tertib, pencatatan aset tetap yang tidak memadai, belanja pegawai yang tidak sesuai peruntukan, serta belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan.

Sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi laporan keuangan serta menghindari kecurangan dan pemborosan. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks otonomi daerah, efektivitas sistem pengelolaan keuangan menjadi

kunci dalam mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, serta pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian internal dalam pemerintahan.

Lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh integritas pegawai dan kepemimpinan yang kompeten, menjadi elemen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penilaian risiko harus dilakukan secara menyeluruh oleh pimpinan dan pegawai guna menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan dan penggunaan anggaran.

Kesalahan dalam pengelolaan keuangan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta minimnya pendampingan dari instansi terkait, seperti Inspektorat Kabupaten Balangan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian harus diterapkan secara aktif melalui kebijakan dan prosedur yang jelas. Pimpinan harus terlibat langsung dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Selain itu, informasi dan komunikasi juga berperan penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, komunikasi yang efektif antara pimpinan dan pegawai, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi, dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan. Evaluasi ini mencakup tindak lanjut terhadap temuan audit serta penyesuaian sistem berdasarkan regulasi terbaru. Jika pengendalian internal dilakukan secara rutin dan berkala, maka pencapaian visi dan misi organisasi dapat lebih terarah dan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

Kualitas laporan keuangan menjadi aspek utama dalam mencerminkan kinerja organisasi. Laporan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kemudahan pemahaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Balangan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih terdapat beberapa temuan permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 hingga 2022, ditemukan beberapa masalah di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, seperti:

1. Pengelolaan kas yang kurang tertib, seperti saldo rekening yang belum dilengkapi dengan perjanjian dengan Bank Kalsel serta belum diterapkannya kebijakan transaksi non-tunai.
2. Aset tetap yang belum tercatat dengan baik, termasuk aset bantuan dari pemerintah pusat yang belum diakui sebagai aset daerah.

3. Belanja pegawai yang tidak sesuai peruntukan, termasuk kelebihan pembayaran belanja operasional kepala daerah.
4. Belanja hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Apakah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan ?
2. Apakah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan ?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan ?

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan ini mengadopsi pendekatan COSO yang menekankan pentingnya faktor manusia dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Dalam pendekatan ini, pengendalian tidak hanya berfokus pada prosedur dan kegiatan, tetapi juga pada lingkungan pengendalian yang mencakup etika, integritas, dan kompetensi pimpinan serta pegawai.

SPIP bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan

pemerintahan, meningkatkan keandalan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu menetapkan tujuan secara jelas, mengidentifikasi risiko, serta menganalisis dan mengelola risiko dengan baik. Penilaian risiko menjadi salah satu komponen utama dalam SPIP, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menetapkan tujuan pada berbagai tingkatan serta mengelola perubahan yang terjadi.

Dalam implementasinya, SPIP juga mengharuskan adanya sistem informasi dan komunikasi yang baik guna memastikan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, pemantauan pengendalian harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan.

Penerapan SPIP yang baik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan sistem pengendalian yang efektif, diharapkan pemerintah dapat mengurangi risiko penyimpangan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Kualitas Laporan Keuangan

Nordiawan (2010: 44) menyatakan bahwa definisi karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah "ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya". Karakteristik suatu laporan keuangan menurut Governmental Accounting Standards Board (1987) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting (par. 62) menyatakan bahwa: Financial reporting is the means of communicating financial information to users. For this

communication to be effective, information in financial reports must have these basic characteristics: understandability, reliability, relevance, timeliness, consistency, and comparability.

Laporan keuangan merupakan artian dari pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi ini menjadi lebih efektif, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dasar meliputi mudah dipahami, reliabel, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dibandingkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, serta memprediksi masa depan. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, serta lengkap.

Manfaat umpan balik memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, sedangkan manfaat prediktif membantu dalam memperkirakan masa depan berdasarkan data masa lalu dan kejadian saat ini. Ketepatan waktu dalam penyajian memastikan informasi tetap berguna dalam pengambilan keputusan. Kelengkapan laporan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan, dengan pengungkapan yang jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, menyajikan fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang tidak andal, meskipun relevan, dapat menyesatkan pengguna.

Penyajian jujur memastikan informasi mencerminkan transaksi dan peristiwa

sebagaimana mestinya. Dapat diverifikasi berarti informasi dapat diuji dan memberikan hasil yang konsisten. Netralitas mengindikasikan bahwa informasi disusun untuk kebutuhan umum tanpa memihak kepentingan tertentu.

Dapat Dibandingkan

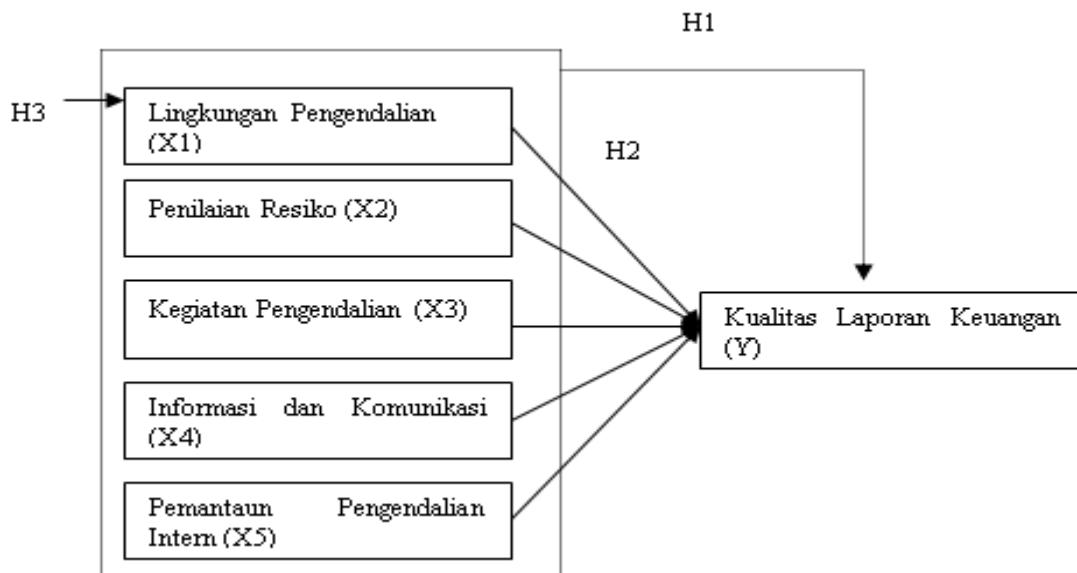
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dipergunakan sebagai landasan penelitian ini adalah bahwa institusi pemerintah perlu memperhatikan faktor Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern karena hal tersebut dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual****Hipotesis**

1. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
2. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
3. Lingkungan Pengendalian berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan

Pemantauan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang terlibat dalam laporan keuangan pada 9 (sembilan) bagian dan setiap bagian terdapat 5 (lima) orang pegawai yang terlibat dalam keuangan sehingga populasi keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Seluruh populasi akan dijadikan sampel dengan teknik sampel jenuh yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang terlibat dalam laporan keuangan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Adalah teknis analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018), yaitu : $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda Variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan Pengendalian Intern (X5)

terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$). Untuk mengkaji kebenaran

hipotesis tersebut digunakan analisis regresi linier berganda. Pada analisis regresi ini akan dilakukan uji serentak atau uji F serta parsial atau uji t.

Tabel 1
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (bi)	t hitung	t tabel	Beta	sig
Konstanta	4,192				
Lingkungan Pengendalian (X1)	0,231	3,320	2,024	0,379	0,002
Penilaian Risiko (X2)	0,209	2,462	2,024	0,326	0,018
Kegiatan Pengendalian (X3)	0,009	0,110	2,024	0,013	0,913
Informasi dan Komunikasi (X4)	0,261	2,049	2,024	0,233	0,047
Pemantauan Pengendalian Intern (X5)	0,127	1,055	2,024	0,138	0,298
Konstanta = 4,192		F hitung = 10,811			
Multiple R = 0,762		F tabel = 2,61			
R square (R ²) = 0,581		Sig = 0,000			

Pada tabel 1 dapat dilihat R Square sebesar 0,581 yang berarti besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah 58,1% sedangkan sisanya 41,9% dijelaskan oleh sebab lain diluar dari penelitian ini.

Nilai R Square sebesar 0,581 atau 58,1% menyatakan korelasi hubungan variabel bebas Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan Pengendalian Intern (X5) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang sangat kuat.

Berdasarkan tabel 1 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,192 + 0,231 X_1 + 0,209 X_2 + 0,009 X_3 + 0,261 X_4 + 0,127 X_5 + ei$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta = 4,192 Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 4,192. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Lingkungan Pengendalian (X1) = 0,231 Nilai koefisien regresi variabel Lingkungan Pengendalian (X1) sebesar 0,231 bernilai positif, yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel Lingkungan Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan jika variabel Lingkungan Pengendalian mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,231 atau 23,1%.

variabel Lingkungan Pengendalian mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,231 atau 23,1%.

3. Penilaian Risiko (X2) = 0,209 Koefisien regresi variabel Penilaian Risiko (X2) sebesar 0,209 bernilai positif, yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel Penilaian Risiko dengan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan jika variabel Penilaian Risiko mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,209 atau 20,9%.
4. Kegiatan Pengendalian (X3) = 0,009 Nilai koefisien regresi variabel Kegiatan Pengendalian (X3) sebesar 0,063 bernilai positif, yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel Kegiatan Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan jika variabel Kegiatan Pengendalian mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,009 atau 0,09%.
5. Informasi dan Komunikasi (X4) = 0,261 Nilai koefisien regresi variabel Informasi dan Komunikasi (X4) sebesar 0,261 bernilai positif, yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel Kegiatan Pengendalian

dengan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan jika variabel Kegiatan Pengendalian mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,261 atau 26,1%.

6. Pemantauan Pengendalian Intern (X5) = 0,127 Nilai koefisien regresi variabel Pemantauan Pengendalian Intern (X5) sebesar 0,127 bernilai positif, yang menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel Kegiatan Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan jika variabel Kegiatan Pengendalian mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,127 atau 12,7%.

Uji Simultan

Tabel 2
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi on	572.715	5	114.543	10.81	.000 ^b
Residual	413.196	39	10.595		
Total	985.911	44			

Berdasarkan tabel 2 hasil uji simultan, nilai F tabel sebesar 2,61. Artinya Fhitung (10,811) > Ftabel (2,61) sehingga hipotesis pertama yang mengatakan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dapat diterima..

Uji Parsial

Tabel 3
Rekapitulasi Uji Parsial

Variabel Bebas	Nilai Signifikansi	t hitung
Lingkungan Pengendalian (X1)	0,002	3,320
Penilaian Risiko (X2)	0,018	2,462
Kegiatan Pengendalian (X3)	0,913	0,110
Informasi dan Komunikasi (X4)	0,047	2,049
Pemantauan Pengendalian Intern (X5)	0,298	1,055

Berdasarkan tabel 3, dapat dijelaskan bahwa :

- Pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Lingkungan Pengendalian (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) karena nilai thitung (3,320) > ttabel (2,024) dan Sig 0,013 < 0,05.
- Pengaruh variabel Penilaian Risiko (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), Penilaian Risiko (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dapat dilihat dari tabel 5.13 dimana thitung (2,462) > ttabel (2,024) dan Sig 0,002 < 0,05.
- Pengaruh variabel Kegiatan Pengendalian (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), Kegiatan Pengendalian (X3) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan arah negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dapat dilihat dari tabel 5.21 dimana thitung (0,110) < ttabel (2,024) dan Sig 0,913 < 0,05.
- Pengaruh variabel Informasi dan Komunikasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), Informasi dan Komunikasi (X4) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan arah negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dapat dilihat dari tabel 5.13 dimana thitung (2,049) > ttabel (2,024) dan Sig 0,047 < 0,05.
- Pengaruh variabel Pemantauan Pengendalian Intern (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern (X5) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan arah negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dapat dilihat dari tabel 5.21 dimana thitung (1,055) < ttabel (2,024) dan Sig 0,298 > 0,05.

Dengan demikian hipotesis kedua yang mengatakan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan adalah tidak terbukti.

Uji Dominan

- Nilai Beta variabel Lingkungan Pengendalian sebesar 0,379.
- Nilai Beta variabel Penilaian Risiko sebesar 0,326.
- Nilai Beta variabel Kegiatan Pengendalian sebesar 0,013.
- Nilai Beta variabel Informasi dan Komunikasi sebesar 0,233.
- Nilai Beta variabel Pemantauan Pengendalian Intern sebesar 0,138.

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Pengendalian (X1) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Sehingga, hipotesis keiga yang berbunyi "Lingkungan Pengendalian berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan" dinyatakan benar atau diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 4
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.581	.527	3.255

Pada tabel 4 nilai R sebesar 0,581 yang berarti besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah 58,1% sedangkan sisanya 41,9% dijelaskan oleh sebab lain diluar dari penelitian ini, berdasarkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian kuat dengan hasil 0,581 sesuai dengan tabel korelasi terletak diantara 0,51 s.d.0,99 dengan penilaian korelasi yang kuat.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai jika pegawai yang terlibat dalam proses penyusunannya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden umumnya setuju bahwa laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan disajikan tepat waktu, lengkap, jujur, dapat diverifikasi, netral, serta dapat dibandingkan secara internal dan eksternal. Selain itu, laporan keuangan juga dinilai mudah dipahami.

Penelitian ini mengacu pada PP 60 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa Lingkungan Pengendalian berperan dalam menciptakan kondisi kerja yang mendukung efektivitas pengendalian intern. Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan aktif dalam menanggapi risiko yang telah diidentifikasi, sedangkan Informasi dan Komunikasi menjadi sarana penting dalam pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Pemantauan Pengendalian Intern digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan.

Secara statistik, penelitian ini membuktikan bahwa kelima variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Penelitian ini membuktikan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Integritas, etika kerja, dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama dalam menghasilkan laporan yang berkualitas.

Responden penelitian mayoritas menyatakan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip pengendalian yang baik, seperti penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia yang sehat. Selain itu, organisasi juga memberikan kewenangan yang tepat kepada pegawai sesuai tanggung jawabnya, melakukan evaluasi struktur organisasi, serta menerapkan manajemen

risiko dan tata kelola yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Lingkungan Pengendalian adalah fondasi utama dalam sistem pengendalian internal. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik, kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengendalian akan meningkat. Ke depan, agar laporan keuangan tetap berkualitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu memastikan bahwa pegawai yang menangani keuangan memiliki integritas, kejujuran, dan etika kerja yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan Lingkungan Pengendalian dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$.

2. Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Penelitian ini membuktikan bahwa Penilaian Risiko berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Jika organisasi melakukan penilaian risiko dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Responden penelitian mayoritas setuju bahwa organisasi telah menerapkan identifikasi risiko dengan metodologi yang sesuai, baik untuk tujuan instansi maupun tingkat kegiatan secara komprehensif. Organisasi juga menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan eksternal, melakukan analisis risiko pekerjaan, serta menetapkan dampak yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Pegawai bagian keuangan memahami risiko pekerjaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Penilaian risiko harus dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan keuangan, agar laporan keuangan lebih akurat. Analisis risiko dapat dilakukan secara bersama-sama atau dengan pendampingan APIP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa seluruh pegawai, bukan hanya pimpinan, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau risiko yang dapat menghambat

pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko internal dan eksternal harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasional. Penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan Penilaian Risiko terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

3. Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Artinya, pegawai yang terlibat dalam proses keuangan tidak terpengaruh oleh kegiatan pengendalian yang diterapkan oleh organisasi.

Responden penelitian mayoritas setuju bahwa organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian yang berfokus pada tugas utama instansi, dikaitkan dengan penilaian risiko, serta disesuaikan dengan sifat khusus organisasi. Organisasi juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian. Namun, meskipun kegiatan pengendalian diterapkan, pegawai yang menangani laporan keuangan cenderung mengandalkan pengalaman dan kebiasaan berkonsultasi dengan atasan atau rekan kerja senior daripada mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Nurilhamdi dan Apudjiwan (2019), yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Semarang. Hal ini disebabkan oleh ketidakstekatan dalam penilaian risiko dan lemahnya implementasi aktivitas pengendalian. Posisi penelitian ini mendukung bahwa Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$.

4. Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Penelitian ini menunjukkan bahwa

Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Jika sistem informasi dan komunikasi dikelola dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Responden penelitian mayoritas setuju bahwa organisasi telah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk serta sarana komunikasi dengan baik. Selain itu, organisasi mampu mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan. Salah satu upaya penguatan komunikasi dan informasi adalah dengan meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menyediakan data pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat. Tidak hanya operator, tetapi juga PPTK dan pegawai lainnya yang terlibat dalam laporan keuangan perlu memahami dan memantau sistem ini secara efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018), yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini menegaskan bahwa Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

5. Pengaruh Pemantauan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemantauan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Artinya, pegawai yang terlibat dalam proses keuangan tidak terpengaruh oleh pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi.

Mayoritas responden penelitian setuju bahwa organisasi telah melakukan pemantauan berkelanjutan melalui

pengelolaan rutin, supervisi, dan rekonsiliasi. Organisasi juga melakukan evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri dan review, serta segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan review. Namun, meskipun mekanisme pemantauan telah diterapkan, pegawai tetap kurang terpengaruh oleh pengendalian internal yang ada, sehingga masih ditemukan berbagai temuan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengendalian internal perlu ditingkatkan agar lebih berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Sahala Purba (2021), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa Pemantauan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$.

Lingkungan Pengendalian sebagai Variabel Dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dengan nilai beta terbesar sebesar 0,379. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa Lingkungan Pengendalian merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang menekankan bahwa Lingkungan Pengendalian berperan dalam membentuk kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal. Sebagai pondasi utama dalam sistem pengendalian internal, Lingkungan Pengendalian menciptakan kondisi kerja yang efektif.

Agar laporan keuangan berkualitas, pegawai yang terlibat harus memiliki integritas, etika kerja yang baik, serta mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, pekerjaan dapat berjalan dengan

baik, meminimalkan penyimpangan, serta mengurangi temuan audit yang terjadi setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara simultan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
2. Secara parsial Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, sedangkan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
3. Lingkungan Pengendalian. adalah Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Nunuy, Nur. (2010). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Faishol. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/85> . diakses 21 Januari 2024.
- Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097> . diakses 21 Januari 2024.
- Bastian. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Dendawijaya, Lukman. (2012). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erlina, Rambe .(2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.
- Fiane Rina Sambuaga. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi" (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Keerom). <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/1224/1028> diakses 21 Januari 2024.
- Ghozali dan Chariri. (2007). Teori Akuntansi. Badan Penerbit. Universitas. Diponegoro. Semarang.
- Harahap, Sofyan. S .(2008). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta.
- Imawan. (2012). Pelayanan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kurniawan. (2012). Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Lopiyadi, Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi. (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Lucas JR Henry. C, (2000). Analisis, Desain, dan Implementasi Sistem. Informasi, Edisi Tiga, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyana, (2009). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan .(2007). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta:

- Salemba Empat.
- Nurilhamdi, Apudjiwan (2019) Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Kota Semarang).
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual
- Rahmayati. (2012). Teori Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. (2001). Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Indeks.
- Sahala Purba. (2021). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo). <https://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/136>
- Siagian. P., Sondang. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. Dr. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Sri. (2008). Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan. Jakarta: Gramedia.
- Suryo Triono. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Susilo. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiptono. (2004). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Widjajarno, Bambang .(2008). Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. Jakarta.